

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang berkomitmen untuk mencapai tujuan. Tujuan paling mendasar yaitu mendapatkan keuntungan serta kemakmuran bagi para pemegang saham. Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan, yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya, karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan saham perusahaan.

Nilai perusahaan yang meningkat bisa dicapai apabila manajemen perusahaan mampu menjalin kerja sama yang baik dengan pihak lain di dalam membuat keputusan-keputusan keuangan. Pihak lain tersebut diantaranya meliputi *shareholder* dan *stakeholder*. Apabila tindakan yang dilakukan manajer dan pihak lain tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka permasalahan tidak akan terjadi diantara kedua belah pihak tersebut. Akan tetapi kondisi yang sesungguhnya, penyatuan kepentingan antara kedua belah pihak tersebut sering kali menemui masalah (Borolla, 2011). Adanya masalah diantara manajer dan pemegang saham disebut masalah agensi.

Krisis yang terjadi di Amerika Serikat menimbulkan efek bagi perekonomian dunia. Indonesia yang terkena dampak krisis ekonomi global, isu mengenai sistem tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) telah menjadi bahasan yang sangat penting dalam rangka mendukung pemulihan kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan perekonomian setelah masa-masa krisis. Hadirnya *good corporate governance* dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi mutlak diperlukan, mengingat *good corporate governance* mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam sebuah organisasi. *Corporate governance* lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. (Prasetyo widyo iswara, 2014)

Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu, serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan dan kinerja pemangku kepentingan secara akurat dan transparan.

Jatuhnya perusahaan-perusahaan publik di berbagai dunia pada awal tahun 2000-an, seperti *Enron*, *World Com* dan *Tyco* di Amerika Serikat, *HIH Insurance* dan *One-Tel* di

Australia, London & *Commonwealth* di Inggris dan lainnya telah menimbulkan permasalahan tentang penerapan *Corporate Governance* perusahaan di seluruh dunia. (Yushita Marini dan Nisha Marina, 2017).

Meskipun para perusahaan tersebut telah menerapkan *corporate governance*, namun praktik curang tetap terjadi dan mengakibatkan kehancuran perusahaan-perusahaan tersebut. *Good Corporate Governance* (GCG) dianggap mampu dijadikan salah satu solusi untuk diterapkan pada perusahaan agar terhindar dari kehancuran perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan manajemen perusahaan maupun *fraud* yang dilakukan oleh manajemen puncak yang berlangsung dalam waktu lama dan tidak terdeteksi. Pada tahun 2002, Kongres Amerika mengesahkan undang-undang *The Sarbanes-Oxley Act (SOX)* yang mengatur penerapan *corporate governance* perusahaan di Amerika, dimana seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek harus mematuhi peraturan didalamnya, jika tidak maka perusahaan tersebut akan terkena sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia, penerapan GCG dipicu oleh terjadinya krisis ekonomi asia pada tahun 1997. Salah satu penyebab krisis yang terjadi pada saat itu diantaranya dikarenakan oleh lemahnya pengawasan terhadap dewan direksi perusahaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris. (Herwidayatmo, 2000). Kolapsnya perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan perbankan, yang mengikuti terjun bebasnya nilai mata uang Rupiah, menyebabkan Indonesia membutuhkan dana bantuan dari pihak asing. The International Monetary Funds (IMF) bersedia memberikan dana kepada pemerintah, dengan salah satu syarat agar pemerintah berkomitmen memperbaiki sistem *corporate governance* perusahaan di Indonesia (Kurniawan dan Indriantoro, 2000).

Dengan perkembangan zaman, khususnya dalam kegiatan usaha di Indonesia, kegiatan tersebut semakin pesat, dan persaingan antar pelaku usaha semakin ketat. Oleh karena itu, baik perusahaan swasta maupun BUMN perlu mengembangkan lebih lanjut dan menerapkan sistem dan paradigma baru kegiatan bisnis, yaitu melalui penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau disingkat GCG) agar perusahaan dapat bersaing. Di dalam negeri maupun luar negeri

Untuk mewujudkan terjadinya peningkatan dan kemajuan terhadap kinerja perusahaan maka dibutuhkan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di setiap perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan perhatian utama bagi investor (McKinsey & co. dalam Tjager et al 2003). Hal tersebut memberikan pengaruh positif yaitu perusahaan

dapat dipercaya oleh para pelaku bisnis sehingga dapat bertahan dalam kurun waktu yang panjang dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Konsep dari tata kelola perusahaan ini diharapkan dapat melindungi para investor (*Stockholders*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya (Sutedi, 2012).

Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja manajemen. Adanya tata kelola perusahaan yang baik dinilai menjadi syarat yang diperlukan untuk menjembatani investor dan manajemen perusahaan.

Dalam tata kelola perusahaan terdapat masalah yaitu terjadinya perbedaan kepentingan. Penyebab dari perbedaan tersebut antara lain karena karakteristik kepemilikan saham perusahaan, dan konflik antara manajer dan investor apabila terjadi perbedaan kepentingan. Selain itu, jika suatu perusahaan dikelola tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari pemegang saham maka akan menimbulkan konflik juga. Konflik tersebut sering disebut dengan konflik keagenan.

Kepemilikan institusional atau kepemilikan saham oleh investor yang berasal dari pihak luar perusahaan, seperti berasal dari sektor keuangan perusahaan efek, perusahaan asuransi, perbankan, perusahaan investasi, dan dana pensiun (Aminudin, 2004). Dengan adanya kepemilikan saham yang besar oleh institusi maka akan mendorong peningkatan pengawasan (*monitoring*) yang lebih optimal dan efektif terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meminimalisasi konflik keagenan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Haruman, 2007). Haruman (2008) menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris. Merupakan rapat yang dilakukan dewan komisaris guna untuk mengawasi perusahaan apakah terdapat masalah di dalam perusahaan atau tidak. Apabila terdapat masalah maka dewan komisaris harus segera mencari solusi agar tidak berdampak buruk bagi perusahaan (Astrini et al., 2017).

Dewan komisaris independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan komisaris Independen merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan (FCGI, 2001). Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat

mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Budiono, 2005).

Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor penentu investasi saham oleh calon investor. Bagi perusahaan, menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan menjadi salah satu syarat yang diperlukan agar saham tersebut tetap eksis dan terus diminati oleh investor. Mengenai kinerja, laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan akhir dari proses akuntansi, dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang dapat menjelaskan situasi perusahaan dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu indikator yang digunakan investor untuk menilai perusahaan dari harga pasar saham tersebut di bursa efek Indonesia. Semakin baik kinerja perusahaan maka semakin tinggi pula return yang didapat investor. Biasanya investor akan mencari perusahaan yang berkinerja terbaik dan berinvestasi di perusahaan tersebut.

Fundamental perusahaan merupakan penilaian kinerja keuangan berdasarkan efektif dan efisien perusahaan dalam menggunakan sumberdaya, fundamental yang baik dan kuat akan direspon positif oleh investor karena diharapkan akan meningkatkan profit pada setiap tahunnya, selain itu diharapkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya meningkat sehingga akan meningkat pula nilai perusahaan (Nurhalifah, 2019).

**Tabel 1.1**

**Rata-rata Corporate Governance, ROA dan Tobins Q pada industri makanan dan minuman pada tahun 2017-2019**

| <b>Tahun</b> | <b>Kepemilikan Institusional</b> | <b>Frekuensi Rapat Dewan Komisaris</b> | <b>Dewan Komisaris Independen</b> | <b>ROA</b> | <b>Nilai Perusahaan (Tobins Q)</b> |
|--------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2017         | 0.6676                           | 6                                      | 0.3729                            | 0.2007     | 2.3797                             |
| 2018         | 0.6007                           | 7                                      | 0.3889                            | 0.0936     | 4.6196                             |
| 2019         | 0.6002                           | 7                                      | 0.4017                            | 0.1888     | 3.6176                             |

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa rata-rata kepemilikan institusional mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,74 % hingga tahun 2019, untuk frekuensi rapat dewan komisaris cenderung meningkat sejak tahun 2017. Sedangkan dewan

komisaris independen mengalami peningkatan hingga tahun 2019 sebesar 2,88 %. Dengan adanya peningkatan komposisi dewan komisaris independen dalam perusahaan maka itu baik untuk perusahaan karena dewan komisaris independen adalah posisi terbaik dalam melaksanakan fungsi pengawasan atau pemantauan demi tercapainya corporate governance yang baik dalam perusahaan. Kinerja keuangan dalam hal ini adalah ROA mengalami fluktuatif dan cenderung menurun sebesar 1,19% hingga tahun 2019 menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut masih tidak stabil di industri makanan dan minuman, nilai perusahaan yang berfluktuasi pada tahun 2017-2019, dari tahun 2017-2019 nilai perusahaan menurun sebesar 1.2379. Nilai perusahaan naik dan turun yang terlalu jauh dapat menimbulkan masalah yaitu perusahaan akan kehilangan daya tariknya di mata investor. Hal ini membuat investor kurang percaya terhadap kinerja dari perusahaan tersebut, sehingga mereka akan memilih untuk menghindari berinvestasi di dalam perusahaan tersebut.

Alasan pemilihan industri makanan dan minuman adalah prospek perkembangan subsektor industri makanan dan minuman yang sangat luas. Pasalnya, industri makanan dan minuman merupakan industri yang mampu bertahan dari krisis ekonomi. Baik dalam keadaan krisis maupun tidak, masyarakat masih membutuhkan sebagian besar produk makanan dan minuman. Karakteristik masyarakat Indonesia yang suka berbelanja makanan membuat industri makanan dan minuman tetap bertahan. Menurut (Benny Wahyudi, 2007) pertumbuhan industri makanan dan minuman akan tetap baik bahkan terus mengalami kenaikan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk industri perusahaan makanan dan minuman ini lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh musim atau terjadi perubahan kondisi perekonomian secara inflasi atau dengan kata lain, kelancaran produk perusahaan *food and beverages* akan tetap terjamin karena sektor ini bergerak pada bidang industri pokok manusia.

Pada Penelitian Alfinur (2016) dari hasil penelitian Menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Tarjo (2008) dan Murwaningsih (2009) yang menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional meningkatkan kepercayaan public terhadap perusahaan.

Pada Penelitian Widya Lestari (2017) dalam hasil penelitian menyatakan Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan tetapi penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Misbahul munir (2015) dalam hasil penelitian menyatakan bahwa Frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pada penelitian Lastanti (2004) dari hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara dewan komisaris independen dengan nilai perusahaan. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan Dewi Rachmania (2015) bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dari uraian-uraian diatas bahwa Good Corporate Governance yang mempengaruhi nilai perusahaan masih menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, maka Berdasarkan uraian dan fenomena diatas judul penelitian ini adalah

**“Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel intervening Pada Industri Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”.**